

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023
 PPID PELAKSANA RSUD Dr. MOEWARDI**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi tentang dugaan pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi maupun masyarakat.	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.	<p>Dibuka apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan. 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Surakarta, 2 Januari 2023
 Direktur RSUD Dr. Moewardi
 Provinsi Jawa Tengah



Cahyono Hadi